

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

ISSN : 2443-1214

Kepemimpinan Dalam Pembangunan Sektor Publik Berbasis Pengetahuan

Ida Farida

Pengaruh Implementasi Dana Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan

Malik

Analisis Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Fisik Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung

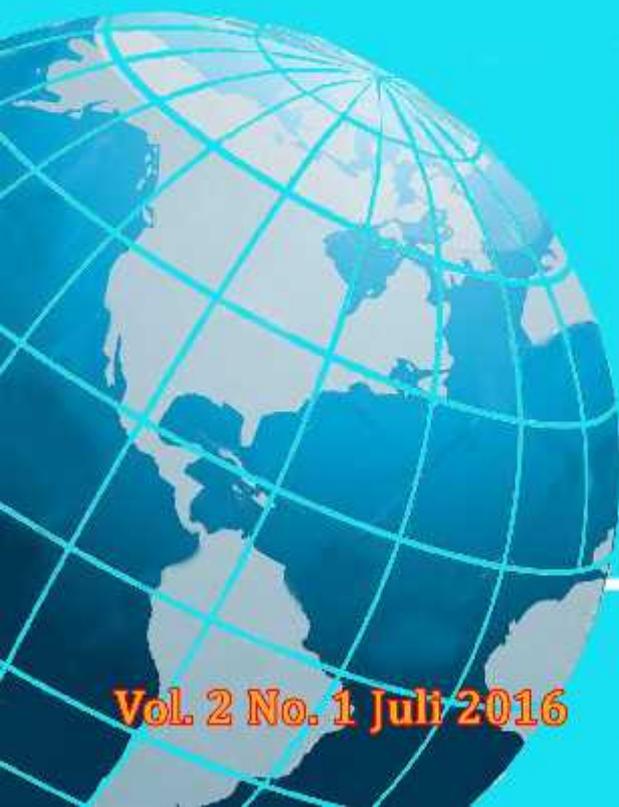
Marbaki

Pemberdayaan Warga Negara Dalam Pelayanan Publik Manajemen Pendidikan Dasar di Kota Kendari

Rahman

Aplikasi Konsep *Reinventing Government*, *Good Governance* dan *New Public Service* Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung

Yadi Lustiadi



Vol. 2 No. 1 Juli 2016

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 1 Juli 2016

Pembina

Dr. Ir. M. Yusuf S. Barusman, MBA

Penanggung Jawab

Dr. Yadi Lustiadi, M.Si

Ketua Penyunting

Dr. Malik, M.Si

Penyunting Ahli

Prof. Dr. Yulianto, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Supriyanto, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Akhmad Suharyo, M.Si (FISIP-UBL)

Dr. Nur Efendi, M.Si (FISIP-UNILA)

Dr. Jamal, M.Si (FISIP-UHO)

Penyunting Pelaksana

Dra. Azima Dimiyati, MM

Vida Yunia Cancer, S.AN

Tata Usaha

Winda, SE

Atin Inayatin, S.AP

Penerbit

Universitas Bandar Lampung

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Alamat Redaksi

Program Pascasarjana Magister Ilmu Administrasi

Kampus B Jln. Z.A. Pagar Alam No. 89 Labuhan Ratu – Bandar Lampung 35142

Telp: (0721) 789825, Fax: (0721) 770261, E-mail: Pascasarjana@ubl.ac.id

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 1 Juli 2016

DAFTAR ISI

Kepemimpinan Dalam Pembangunan Sektor Publik Berbasis Pengetahuan Ida Farida	1-12
Pengaruh Implementasi Dana Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan Malik	13-24
Analisis Pengaruh Perencanaan Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Fisik Bangunan Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung Marbaki	25-39
Pemberdayaan Warga Negara Dalam Pelayanan Publik Manajemen Pendidikan Dasar di Kota Kendari Rahman	40-54
Aplikasi Konsep <i>Reinventing Government, Good Governance Dan New Public Service</i> Dalam Pelayanan Publik di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung Yadi Lustiadi	55-71

**PENGARUH IMPLEMENTASI DANA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
TERHADAP EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI
KECAMATAN BAKAUHENI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN**

OLEH :

MALIK, DOSEN FISIP – UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG

ABSTRACT

Influence of Implementation of Fund of Society Enableness To Effectiveness of overcoming Poorness In Subdistrict of Bakauheni Regency Float the South arch

Problem of this research is : (1) What Implementation of Fund of Society Enableness have an effect on to Effectiveness of overcoming Poorness In Subdistrict of Bakauheni Regency Float the South arch, (2) How big influence of Implementation of Fund of Society Enableness to Effectiveness of overcoming Poorness In Subdistrict of Bakauheni Regency Float the South arch.

Research Method which is according to researcher as according to this research method is use the this research type is explanatory survey. Research population as much 510 group of family of receiver of Implementation of Fund of Enableness of Regency Society Float the South arch. By utilizing formula opened by Riduan (2004:5) hence sum up the sampel determined by as much 60 people.

Result of research indicate that there is Influence of Implementation of Fund of Society Enableness to Effectiveness of overcoming Poorness In Subdistrict of Bakauheni Regency Float the South arch, biggest influence from variable of maker of Implementation of Fund of Society Enableness that is organizational dimension of executor of equal to 69.72, while smallest dimension from variable of maker of Implementation of Fund of Society Enableness is ideal policy dimension that is equal to 64.86. contribution of Variable of Implementation of fund of society enableness to effectiveness of penanggulangan poorness be at the category enough. The mentioned happened by because Implementation of fund of society enableness conducted by not yet full according to rule which have been determined, so that uncommitt optimally.

Keywords : Pemberdayaan, Masyarakat, Efektivitas, Penanggulangan

A. Pendahuluan

Latar Belakang Penelitian

Kemiskinan pada hakekatnya terjadi karena adanya ketimpangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas disatu pihak dan adanya keterbatasan-keterbatasan pada pihak lain, baik yang bertalian dengan sumber daya alam maupun sumber daya manusianya sendiri. Dalam hal ini Wignyosoebroto (1996:1) mengatakan : "...kemiskinan pada hakekatnya adalah keadaan berkurangnya sumber daya alam yang diperlukan seseorang atau sekelompok orang untuk melestarikan hidupnya secara layak".

Oleh sebab itu, identifikasi masalah yang dapat dikemukakan dalam penelitian ini sesuai hasil penelitian pendahuluan adalah :

1. Belum efektifnya pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat, yang ditandai dengan kurangnya sosialisasi implementasi kebijakan Pemberdayaan Masyarakat , sehingga masyarakat tidak mengetahui informasi yang jelas tentang implementasi kebijakan tersebut.
2. Minimnya kemampuan sumber daya dalam implementasi kebijakan Pemberdayaan Masyarakat di

Kecamatan Bakauheni, sehingga sasaran kebijakan atau kurang optimal, yang ditandai dengan pendataan masyarakat miskin yang kurang sesuai dengan harapan oleh masyarakat, kemudian pembagian Pemberdayaan Masyarakat mengalami berbagai kendala.

3. Organisasi pelaksana, yang dalam hal ini adalah sikap dan perilaku para pelaksana yang menunjukkan masih minimnya kesungguhan para pelaksana dalam mengimplementasikan Kebijakan.
4. Dari Aspek faktor lingkungan, meliputi lingkungan organisasi pelaksana yang tumpang tindih tugas dan kewenangan serta antar sektor dan antar level serta lingkungan masyarakat sasaran kebijakan Pemberdayaan Masyarakat belum sepenuhnya dapat menerima kebijakan tersebut.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dapat dirumuskan masalah penelitian :

1. Apakah Implementasi Dana Pemberdayaan Masyarakat berpengaruh terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.
2. Seberapa besar pengaruh Implementasi Dana Pemberdayaan Masyarakat terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan Di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

Kegunaan Penelitian

Diharapkan informasi yang diperoleh dari penelitian ini dapat berguna baik secara akademis maupun praktis.

1. Bagi Akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan

ilmu pengetahuan, khususnya ilmu administrasi Pembangunan pada aspek pengembangan aparatur.

2. Memberikan masukan yang berguna, dalam rangka meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan.

B. Tinjauan Pustaka

Konsep dan Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu kegiatan dalam proses/siklus kebijakan. Menurut Dunn (2000:16) siklus kebijakan itu terdiri atas : *Agenda setting, policy formulation, policy adaption, policy implementation, policy assesment*". Pada garis besarnya, kegiatan-kegiatan utama dari siklus kebijakan tersebut terdiri atas : "perumusan kebijakan, pelaksanaan (implementasi) dan evaluasi kebijakan" (Mustopadidjaja, 2002:25). Dengan demikian bahwa proses perumusan kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam pembuatan kebijakan, poses implementasi kebijakan, dan berhasil dan tidaknya suatu kebijakan dalam mencapai tujuan sangat ditentukan dalam implementasinya.

Beberapa aspek yang berhubungan dengan pelaksanaan kebijakan yang dikemukakan oleh Hoogerwerf (1978:168) yaitu: 1) Isi Kebijakan , 2). Informasi, 3). Dukungan 4). Pembagian Potensi.

Menurut Smith (2008: 202-205), implementasi sebagai proses atau alur. Model proses atau alur yang dikemukakan oleh Smith ini terlihat bahwa proses kebijakan dari perspektif perubahan sosial dan politik, dimana kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengadakan perbaikan atau perubahan dalam masyarakat sebagai kelompok sasaran.

Menurut Smith (2009: 202-205), mengemukakan bahwa implementasi kebijakan terdiri dari :

1. *The idealized policy, that is, idealized patterns of interaction that those who have defined the policy are attempting to induce.*
2. *The target group, defined as those who are required to adopt new patterns of interaction by the policy. They are the people most directly affected by the policy and who must change to meet its demands.*
3. *The implementing organization, usually a unit of the government bureaucracy, responsible for implementation of the policy.*
4. *The environmental factors, those elements in the environment that influence or are influenced by the policy implementation. The general public and the various special interest groups are here.*

Smith menggunakan model teoritisnya dalam bentuk sistem di mana suatu kebijakan yang sedang diimplementasikan, maka interaksi di dalam dan di antara keempat faktor tersebut mengakibatkan ketidaksesuaian dan akan menimbulkan tekanan atau ketegangan dari berbagai pihak yang kurang sesuai dengan keinginan. Ketidaksesuaian, ketegangan dan tekanan-tekanan tersebut menghasilkan pola-pola interaksi, yaitu pola-pola tidak tetap yang berkaitan dengan tujuan dari suatu kebijakan. Pola-pola interaksi tersebut mungkin menghasilkan pembentukan lembaga-lembaga tertentu, sekaligus dijadikan umpan-balik dari pola-pola transaksi dan kelembagaan.

Faktor-faktor tersebut dapat dipandang sebagai pendekatan-pendekatan dalam implementasi kebijakan, yaitu menerangkan bagaimana implementasi itu harus dilakukan agar memberikan hasil dan dampak sesuai dengan yang diharapkan. Implementasi kebijakan merupakan tahap yang krusial dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan

harus diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan;

Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti : (1) ada efeknya, pengaruh, kesannya; (2) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha tindakan). (Westra et al, 1985: 149) efektivitas kerja berarti penyelesaian pekerjaan tepat pada waktunya yang telah ditentukan. Artinya apakah penjelasan sesuatu tugas itu diselesaikan, dan tidak pada menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.

Dalam upaya mengukur keberhasilan pelaksanaan kegiatan kata efektivitas sering kali dipergunakan untuk menggambarkan pencapaian tujuan/sasaran kegiatan sebagaimana telah direncanakan. Stoner et al dalam bukunya “manajemen” (edisi bahasa Indonesia oleh Sindoro, efektivitas adalah “kemampuan untuk menentukan tujuan yang memadai ; “Melakukan yang tepat”. (Stoner et al, 1996: 9).

Selanjutnya Ravianto (1989:113), berpendapat bahwa efektivitas organisasi adalah : Seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai perencanaan, baik dalam hal waktu, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif. Dimensi waktu masuk dalam proses efektivitas organisasi, terlebih bila organisasi itu diartikan sebagai suatu elemen dari sistem yang sesar (lingkungan), yang dalam tahap-tahap kerjanya setiap saat mengambil sumber-sumber, memproses dan mengembalikannya pada lingkungan. Karena itu test terakhir yang digunakan terhadap efektivitas organisasi adalah sejauh mana organisasi itu mampu bertahan. Dengan kata lain dapat

dikatakan bahwa keberlangsungan hidup organisasi merupakan ukuran terakhir, atau ukuran jangka panjang mengenai efektivitas organisasi. Pada prinsipnya organisasi dikatakan efektif apabila seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini berarti bahwa apabila sesuatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai perencanaan, baik dalam hal waktu, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Konsep Kemiskinan

Pembangunan sosial kini semakin mendapat perhatian berbagai negara di dunia. Salah satu bentuk perhatian tersebut adalah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Dunia Untuk Pembangunan Sosial (*World Summit on Soda/ Development*) tahun 1995. Sejak Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tersebut, visi pembangunan sosial terus bergulir hingga kini. Deklarasi dan aksi tersebut pada intinya memuat komitmen secara tegas dan kuat mengenai perlunya penanganan segera terhadap penyebab utama dan penyebab struktural terjadinya masalah sosial yang dikemas dalam tiga agenda besar yang terdiri dari :

1. Pengentasan kemiskinan,
2. Perluasan kerja produktif dan pengurangan pengangguran, dan
3. Peningkatan integrasi sosial.

Kemiskinan sosial diartikan oleh Effendi (1993:203), sebagai lemahnya jaringan sosial, struktur sosial yang kurang mendukung, serta kebatasan akses bagi seseorang untuk meningkatkan sumber daya yang ada. Sehubungan dengan itu, Effendi (1993:203) menyebutkan yaitu :

Terdapat dua faktor yang mempengaruhi kemiskinan, yaitu faktor internal berkaitan dengan aspek yang berada dalam diri seseorang yang mendorong proses kemiskinan, dan faktor eksternal berkaitan dengan aspek yang berada diluar diriseseorang, yaitu struktur

sosial yang cenderung melanggengkan sifat ketergantungan dan eksploitatif.

Faktor eksternal berkaitan dengan aspek yang berada diluar kemampuan diri seseorang menurut Supriatna (1997:90), menekankan pada struktur-struktur sosial yang cenderung melanggengkan sifat ketergantungan dan eksplonatif. Fenomena anak buruh nelayan yang berhutang kepada juragannya, digambarkan sangat kecil kemungkinan untuk lepas dari kehidupan struktur itu. Dimensi struktur kemiskinan tersebut tidak saja terbatas pada dimensi sosial, tetapi jua dimensi politik.

Kerangka Pemikiran

Teori implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu yang dikemukakan oleh Smith (2009: 202-205) dengan dimensi-dimensinya yaitu: 1. Kebijakan ideal (*The idealized policy*), 2. Sasaran Kebijakan (*The target group*), 3. **Organisasi Pelaksana** (*The Implementing organization*), 4. **Faktor lingkungan** (*The environmental factors*).

Selanjutnya Ravianto (1989:113), berpendapat bahwa efektifitas organisasi adalah seberapa baik pekerjaan yang dilakukan, sejauhmana seseorang menghasilkan keluaran sesuai dengan yang diharapkan dengan dimensi yang digunakan sebagai pembentuk efektivitas penanggulangan kemiskinan yaitu (1) Satuan Hasil, (2) Satuan Waktu, (3) Kualitas Kerja.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode survai penjelasan (*explanatory survey method*), sesuai dengan tujuan penelitian ini yang akan menganalisis pengaruh antar variabel, yaitu Pengaruh Implementasi Dana Pemberdayaan Masyarakat sebagai variabel bebas (*independent variable*) dengan efektivitas Penggulangan kemiskinan di Kecamatan Bakauheni, sebagai variabel terikat (*dependent*

variable). Peneliti menggunakan pendekatan penelitian sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai yaitu selain menggambarkan dan menjelaskan fakta empirik yang ditemukan di lapangan, juga akan melakukan analisis pengaruh antar variabel yang diteliti.

Pendekatan penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif yang didukung oleh pendekatan kualitatif diarahkan untuk mampu mengungkap secara komprehensif pengaruh antara Pengaruh Implementasi Dana PEMBERDAYAAN Masyarakat dengan Efektivitas Penggulangan kemiskinan di Kecamatan Bakauheni. Untuk melengkapi data utama (data primer) juga digunakan observasi sebagai pelengkap dari metode survey.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Bakauheni, Kabupaten Lampung Selatan. Populasi penelitian ini adalah organisasi/ yang terlibat langsung dalam implementasi Dana PEMBERDAYAAN Masyarakat, yaitu sebanyak 510 KK. Dengan mempergunakan Rumus Rachmat dalam Riduan (2004:5), maka sampel dalam penelitian ini berjumlah sebanyak 60 orang.

Pengujian Hipotesis

Hasil perhitungan tersebut memberikan gambaran yang mengatakan bahwa Implementasi dana pemberdayaan masyarakat berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan. ternyata terbukti kebenarannya. Pembuktian ini ditandai dengan pengaruh X terhadap Y adalah 0,452. atau 45,2%, dengan derajat kepercayaan 95%. Angka perhitungan ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi dana pemberdayaan masyarakat berpengaruh belum optimal dalam mempengaruhi Efektivitas Penanggulangan kemiskinan yaitu hanya sebesar 45,2%, dan masih dipengaruhi

variabel-variabel dari luar yang lebih besar, dengan demikian dalam pelaksanaannya cukup berperan namun belum optimal dalam meningkatkan Efektivitas Penanggulangan kemiskinan.

Hipotesis yang mengatakan bahwa Implementasi dana pemberdayaan masyarakat \berpengaruh secara signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan, ternyata terbukti kebenarannya. Pembuktian ini ditandai dengan koefisien jalur X terhadap Y adalah 0,431. atau 43,1%, dengan derajat kepercayaan 95%. Angka perhitungan ini menunjukkan bahwa variabel Implementasi kebijakan raskin turut mempengaruhi Efektivitas Penanggulangan kemiskinan sebesar 43,1%, dengan demikian bahwa pengaruh diluar Implementasi dana pemberdayaan masyarakat berpengaruh lebih besar, namun demikian dalam penanggulangan kemiskinan cukup berperan dalam mengurangi Efektivitas Penanggulangan kemiskinan, sebab apabila variable Implementasi kebijakan raskin kurang baik dalam pelaksanaannya maka Efektivitas Penanggulangan kemiskinan tidak akan terwujud secara maksimal sesuai dengan kebijakan yang ada.

D. Pembahasan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dimensi kebijakan ideal adalah Cukup yaitu sebesar 67.01% dari seluruh pertanyaan pada dimensi variabel tersebut. Hasil itu, mengindikasikan bahwa implementasi kebijakan yang dikaitkan dengan indikator-indikator tentang kebijakan ideal belum dilaksanakan dengan optimal. Perumusan dan penyusunan tentang operasionalisasi implementasi kebijakan yang harus ditempuh dan dilakukan dalam upaya memberikan pemahaman dan penyebar luasannya belum dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan.

Sejalan yang dikemukakan oleh Nugroho (2003: 263) mengatakan bahwa kebijakan yang ideal adalah harus kontekstual atau mengacu kepada tantangan yang dihadapi pada saat ini dan dimasa depan. Model seperti ini sebagai sebuah pragmatisme dalam kebijakan publik, sebuah pola yang banyak diadopsi oleh negara-negara berkembang dan maju dikawasan Asia.

Salah satu fungsi pemerintah adalah merumuskan untuk memenuhi tuntutan masyarakat sebagai akibat adanya suatu kondisi yang tidak memuaskan. Hal ini menuntut kepekaan dan daya tanggap pejabat publik untuk menangkap dan memahami kebutuhan masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Selanjutnya, tidak hanya sebatas memahami, tetapi juga dituntut untuk melakukan tindakan dalam bentuk suatu kebijakan yang tepat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Menurut Anderson (1997: 3), kebijakan publik adalah (*a purposive course of action followed by an actor on set actors in dealing with a problem or matter of concern*). Jadi pada prinsipnya bahwa kebijakan publik adalah sebagai tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan masyarakat yang tergabung dalam mengemukakan bahwa :

"Pada prinsipnya bahwa implementasi tentang dana pemberdayaan masyarakat, sangat terbantu yang dirasakan oleh masyarakat miskin, namun karena kurang jelasnya penyalurannya sehingga penerapannya kurang menyentuh terhadap kebutuhan tersebut, sebaiknya pemerintah memberikan saja secara utuh sekaligus sehingga masyarakat yang

tergabung dalam kelompok tersebut dapat mengelola dengan baik dana tersebut" (Hasil Wawancara, 2016).

Hal ini didukung oleh Dye, (1987: 68) memberikan batasan mengenai kebijakan publik adalah semua pilihan atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah baik untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. (*Whatever government choose to do or not to do.*). Selanjutnya, menurut Dye bila pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu, maka harus ada tujuannya (obyektif) dan kebijakan publik harus meliputi semua tindakan pemerintah. Jadi, bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Di samping itu, sesuatu yang tidak dilaksanakan oleh pemerintah pun termasuk kebijakan publik. Sebab sesuatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah akan mempunyai pengaruh (dampak) yang sama besarnya dengan sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk *The idealized policy* bahwa dengan adanya dana pemberdayaan masyarakat, sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini, dengan dukungan dana tersedia dalam dana pemberdayaan masyarakat, namun karena pendataan masyarakat miskin belum optimal sehingga masih banyak masyarakat miskin yang belum mendapatkan dana pemberdayaan masyarakat. Hal ini sesuai hasil wawancara dengan Sekretaris Camat Bakauheni mengemukakan bahwa :

"Dana pemberdayaan masyarakat, telah berjalan selama beberapa tahun, namun ada beberapa masalah yang selalu timbul, diantaranya yaitu karena pemahaman tentang pendataan masyarakat miskin yang kurang akurat sehingga ada

masyarakat yang kurang sesuai untuk mendapatkan dana pemberdayaan masyarakat, tapi kenyataannya dapat demikian juga ada masyarakat yang seharusnya mendapat dana pemberdayaan masyarakat, tapi tidak mendapatkan". (Hasil Wawancara, 2016).

Demikian pula hasil penelitian, banyak masyarakat yang kurang layak mendapatkan dana pemberdayaan masyarakat, sesuai ketentuan yang berlaku, tapi kenyataannya menerima dana pemberdayaan masyarakat, walaupun tergabung dalam kelompok usaha bersama, demikian juga sebaliknya ada masyarakat miskin yang layak untuk mendapatkan dana pemberdayaan masyarakat, tapi tidak mendapatkan, hal ini terlihat adanya kesalahan dalam pendataan, yang mungkin disebabkan adanya kolusi, nepotisme ataupun kinerja petugas yang relatif masih rendah. Disisi lain salah tujuan dana pemberdayaan masyarakat tersebut adalah untuk membantu masyarakat miskin meningkatkan daya beli, bahkan diharapkan dapat menanggulangi kemiskinan, namun karena pelaksana kebijakan kurang memperhatikan hal-hal tersebut sehingga masih terdapat kekurangan atau kelemahan-kelemahan dalam pendataan masyarakat miskin, khususnya yang dilakukan oleh petugas pendataan atau pencacahan penduduk,

Walaupun dampak nyata output kebijakan badan pelaksana belum optimal menurut wahab (2005:107), hal ini merupakan perhatian utama para analis kebijakan dan para administrator, seringkali dampak nyata kebijakan itu sulit untuk diukur secara komprehensif dan sistematis. Lagi pula, hal yang barangkali paling diperhatikan dalam evaluasi yang dilakukan oleh sistem politik ialah dampak yang dipersepsikan oleh kelompok

masyarakat dan lembaga atasan yang berwenang. Persepsi mengenai dampak output kebijaksanaan ini mungkin akan menimbulkan perubahan-perubahan tertentu dalam mandat undang-undang.

Menurut Smith (2009:261), kelompok sasaran sebagai kelompok yang akan menerima manfaat langsung dari suatu kebijakan perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh karena partisipasi dari kelompok sasaran sangat bermakna bagi keberhasilan implementasi suatu kebijakan.

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk *The target group* bahwa dukungan masyarakat cukup tinggi terhadap implementasi dana pemberdayaan masyarakat, sehingga pada umumnya setelah menerima dana pemberdayaan masyarakat, ada yang menjual dan dipergunakan untuk membiayai pendidikan anak sekolah yang merupakan aset keluarga, bangsa dan negara, dalam meningkatkan sumber daya manusia. Namun demikian walaupun masyarakat merasakan adanya penambahan penghasilan mereka, tetapi pada umumnya mengatakan bahwa implementasi dana pemberdayaan masyarakat, belum bisa mengubah perilaku mereka dalam hal peningkatan kesejahteraan sehingga pemanfaatan dana pemberdayaan masyarakat, relatif belum terlaksana dengan baik sesuai tujuan, kemudian pada umumnya juga masyarakat penerima dana pemberdayaan masyarakat, belum mengetahui tersebut. Salah satu penyebabnya secara umum adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Supriatna (1997:90), bahwa terdapat relevansi yang positif dan kuat antara gejala kemiskinan penduduk di pedesaan dan perkotaan di satu sisi, dengan pendidikan formal dan nonformal disisi yang lain.

Menurut Coombs ((1983:14) mengatakan bahwa : Bila bentuk

pendidikan formal tidak mampu dilakukan oleh penduduk miskin, maka pemerintah negara berkembanglah yang harus membuat kebijakan pendidikan nonformal untuk mengatasi kesempatan kerja, urbanisasi, peningkatan pendapatan, dan perbaikan kesehatan serta gizi. Pendidikan nonformal ini bisa berupa penyuluhan, penataran, kursus, maupun bentuk keterampilan teknis lainnya.

Dari hasil penelitian pada dimensi *The target group* bahwa pada umumnya masyarakat penerima dana pemberdayaan masyarakat, belum mengetahui dana pemberdayaan masyarakat, pada umumnya mengatakan bahwa tidak perlu mengetahui sebab bukan urusan mereka, yang penting pemerintah menyalurkan dana pemberdayaan masyarakat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini sejalan dengan tujuan pemberian dana pemberdayaan masyarakat, seperti yang dikemukakan Camat Bakauheni yaitu:

"Dana pemberdayaan masyarakat, yaitu untuk menjaga daya beli masyarakat agar dapat terjangkau kebutuhan makannya, khususnya masyarakat miskin. Disisi pemerintah dalam hal ini pelaksana kebijakan perlu adanya sosialisasi dan transparansi terhadap masyarakat agar mengetahui bahwa dana pemberdayaan masyarakat, tidak diberikan setiap saat". (Hasil Wawancara, 2016).

Demikian halnya kalau dilihat dari jawaban responden menyangkut dimensi *The target group* nampaknya pelaksanaan implementasi dana pemberdayaan masyarakat, untuk rumah tangga miskin masih perlu disempurnakan oleh pelaksana kebijakan, karena masih berada pada level cukup, hal ini berarti pemahaman responden terhadap kelompok sasaran belum maksimal atau manfaat dari

implementasi dana pemberdayaan masyarakat, belum banyak menunjang kebutuhan hidup masyarakat miskin.

Untuk dapat menangkap secara spesifik tujuan implementasi kebijakan maka pelaksana kebijakan harus benar-benar mengetahui tentang pesan kebijakan tersebut. Wawancara antara pembuat kebijakan kadang-kadang menghasilkan informasi yang berharga tentang apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh suatu kebijakan.

Menurut Wibawa (1994:20), untuk melaksanakan kebijakan secara efektif menuntut tersedianya sumber daya, baik yang berupa dana maupun insentif lain. Kinerja pelaksana kebijakan akan rendah apabila dana yang dibutuhkan tidak disediakan oleh pemerintah secara memadai. Selain kejelasan standar dan sasaran juga tidak efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar organisasi dan aktivitas pengukuhan. Semua pelaksana harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan yang implementasinya menjadi tanggung jawab mereka. Persoalan tersebut juga berkaitan erat dengan karakteristik birokrasi pelaksana. Struktur birokrasi pelaksana, yang meliputi karakteristik, norma dan pola hubungan yang potensial maupun aktual, sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi.

Kesemua variabel tersebut membentuk sikap pelaksana terhadap kebijakan yang mereka implementasikan, yang pada akhirnya seberapa tinggi kinerja kebijakannya. Kognisi, netralitas dan objektivitas para individu pelaksana sangat mempengaruhi bentuk respons mereka terhadap semua variabel tersebut. Wujud respons individu pelaksana menjadi penyebab dari berhasil dan gagalnya implementasi. Jika pelaksana tidak mengetahui tujuan kebijakan,

lebih-lebih apabila sistem nilai yang mempengaruhi sikapnya berbeda dengan sistem nilai pembuat kebijakan, maka implementasi kebijakan tidak akan efektif. Hal yang sama juga akan terjadi bila loyalitas pelaksana kepada organisasi rendah.

Agar implementasi dana pemberdayaan masyarakat dapat berjalan secara efektif, maka yang harus bertanggungjawab terhadap sebuah kebijakan, harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. Jika implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak tidak secara jelas terspesifikasikan, mungkin saja terjadi kesalahpahaman oleh para pelaksana yang ditunjuk. Sehingga akan terjadi kebingungan para pelaksana mengenai masalah yang harus dilakukannya dan memberi peluang untuk tidak diimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki.

Dalam pelaksanaan kebijakan, tidak terlepas dari kemampuan sumber daya manusia, Robbins (1996 : 82) mengartikan kemampuan sebagai “kapasitas seorang individu untuk mengerjakan berbagai tugas dalam suatu pekerjaan”. Selanjutnya dijelaskan bahwa kemampuan-kemampuan keseluruhan dari seorang individu pada hakekatnya tersusun dari dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual dan kemampuan fisik.

Dari hasil jawaban responden terlihat bahwa organisasi pelaksana belum sepenuhnya berjalan seperti yang diharapkan, hal ini menunjukkan bahwa jawaban responden relatif masih berada pada level cukup, dengan demikian masih perlu penyempurnaan dalam pelaksanaan kebijakan Dana Pemberdayaan Masyarakat .

Dari hasil penelitian bahwa dengan indikator-indikator pembentuk *The*

Implementing organization bahwa struktur organisasi pelaksana kebijakan Dana Pemberdayaan Masyarakat cukup sederhana, namun demikian karena sarana yang tersedia khususnya dalam kebijakan Dana Pemberdayaan Masyarakat, sangat terbatas jumlahnya serta petugas juga relatif kurang, sedangkan masyarakat miskin penerima kebijakan beras untuk rumah tangga miskin (Raskin) relatif tidak seimbang dalam hal ini sangat banyak sehingga terjadi penumpukan setiap kali pembagian raskin.

Jawaban responden, dapat diketahui bahwa faktor Lingkungan, dalam pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya. Demikian pula halnya dengan kebijakan publik. Kebijakan publik pasti akan dibentuk dan membentuk lingkungan sekitarnya (sosial, politik, ekonomi, maupun budaya). Dimana pada satu saat kebijakan publik menyalurkan masukan pada lingkungan sekitarnya, dan pada saat yang sama atau yang lain, lingkungan sekitar dapat membatasi dan memaksakannya pada perilaku yang harus dikerjakan oleh para pengambil keputusan/pembuat kebijakan. Artinya, interaksi antara lingkungan kebijakan dan kegiatan kebijakan publik itu sendiri memiliki hubungan yang saling pengaruh.

Hal ini sesuai dengan pendapat Dye (1987:33), yang mengemukakan isi kebijakan Negara yaitu, penilaian mengenai dampak dari kekuatan-kekuatan yang berasal dari lingkungan terhadap isi kebijakan Negara, analisis mengenai akibat pelbagai pengaturan kelembagaan dan proses-proses politik terhadap kebijakan Negara, penelitian mendalam mengenai akibat-akibat dari pelbagai kebijakan Negara terhadap sistem politik, dan evaluasi dampak kebijakan Negara pada masyarakat, baik berupa dampak yang diharapkan

(direncanakan) maupun dampak yang tidak diharapkan. Jadi pada prinsipnya bahwa kebijakan Negara cukup dipengaruhi dari lingkungan.

Pengertian lingkungan kebijakan yang lebih spesifik perlu dipahami dalam pemaknaan yang plural. Ia harus dipahami dalam tiga kategori besar, pertama, lingkungan umum di luar pemerintahan dalam arti pola-pola yang melibatkan faktor sosial, ekonomi, politik dan nilai-nilai tertentu. Kedua, lingkungan di dalam pemerintahan dalam arti institusional, seperti: karakteristik birokrasi, sumberdaya yang dimiliki, sumberdaya finansial yang tersedia, dan macam sebagainya. Ketiga, lingkungan khusus yang mempengaruhi kebijakan. Tidak hanya itu, beberapa bentuk lingkungan lain yang dapat mempengaruhi kegiatan kebijakan publik, baik dilihat dari sisi formulasi, implementasi, hingga evaluasi atau bahkan perubahan kebijakan publik, antara lain adalah: karakteristik geografis, seperti sumber-sumber alam, iklim, sampai dengan topografi; variabel demografi, seperti populasi masyarakat, persebaran usia, hingga lokasi; budaya politik; sistem sosial; serta sistem ekonomi. Negara lain juga menjadi bagian penting dalam struktur lingkungan kebijakan, khususnya berkaitan dengan kebijakan pertahanan dan kebijakan luar negeri.

Dalam perkembangan implementasi kebijakan faktor lingkungan cukup berpengaruh keberhasilan atau kegagalan kebijakan, konteks lingkungan dikedepankan karena perubahan yang terjadi hari ini dan dimasa depan adalah perubahan dalam volume yang besar dan cepat. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak semata-mata ditentukan oleh keandalan kebijakan dan implementasinya namun dukungan lingkungan juga mempengaruhi

Sesuai hasil wawancara dengan masyarakat penerima kebijakan mengatakan bahwa :

"Kebijakan raskin yang diberikan oleh pemerintah dapat meringankan kebutuhan masyarakat miskin khususnya yang ada di perdesaan, namun belum bisa menanggulangi manyangkut kemiskinan yang ada, karena jumlah yang diberikan cukup terbatas dan masih dibebankan untuk mengembalikan walaupun secara bertahap, yang kami harapkan supaya pemerintah memberikan gratis dan jumlah yang dapat mencukupi dalam menjalankan kegiatan tersebut" (Wawancara, 2016).

Dalam hubungan ini, akan dititik beratkan pada pembahasan faktor lingkungan yang banyak diperhatikan oleh para peneliti kebijakan publik, untuk memahami pengaruhnya terhadap kebijakan yang tercipta.

Jawaban responden, dapat diketahui bahwa Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan, dalam pembuatan kebijakan tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sekitarnya.

Sesuai hasil penelitian tentang variabel implementasi dana pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan teori yang dikemukakan oleh Smith (2009: 202-205) dengan dimensi-dimensinya yaitu: *1. The idealized policy, 2. The target group, 3. The Implementing organization, 4. The environmental factors.* Kemudian teori efektivitas penanggulangan kemiskinan yang dikemukakan oleh Ravianto, (1989) yaitu 1. Satuan Hasil, 2. Satuan Waktu, 3. Kualitas Kerja. Sesuai hasil penelitian bahwa teori tersebut mendukung dari pada penelitian ini, baik implementasi dana pemberdayaan

masyarakat, maupun efektivitas penanggulangan kemiskinan, didukung oleh teori yang dipergunakan. Dengan demikian bahwa penelitian ini dapat diterima sesuai hipotesis penelitian yang diajukan.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengukuran terhadap variabel Implementasi kebijakan dana pemberdayaan masyarakat dimensi-dimensi (1) Kebijakan ideal, (2) Sasaran Kebijakan, (3). **Organisasi**, **(4) Faktor lingkungan**, berpengaruh terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan angka yang berada pada kategori sedang yang berarti bahwa Implementasi kebijakan dana pemberdayaan masyarakat telah dilakukan, namun belum optimal sebagaimana yang diharapkan karena belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dimensi-dimensi tersebut.
2. Implementasi kebijakan berpengaruh signifikan terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan. Sumbangan variabel Implementasi dana pemberdayaan masyarakat terhadap efektivitas penanggulangan kemiskinan berada pada kategori cukup. Hal tersebut terjadi karena Implementasi dana pemberdayaan masyarakat yang dilakukan belum sepenuhnya sesuai ketentuan yang telah ditentukan, sehingga belum terlaksana dengan optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, J.E., 1997, *Public Policy Making*, New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Coombs, Philip H., and Ahmed, Manzoor (1983). *Attacking Rural Poverty: How Nonformal Education Can Help*. Baltimore: The John Hopkin Press.
- Davis, Gordon B., 1984, *Sistem Informasi Manajemen Bagian I & II* (alih Bahasa Widyahartono, B.), Jakarta : Pustaka Binawan Pressindo.
- Dunn, William N., 2000. *Analisis Kebijakan Publik*. Alih Bahasa: Muhadjir Darwin. Yogyakarta: Hamindita Offset.
- Dye, T.R. 1987., *Understanding Public Policy*, New Jensey: Prentice Hall, Inc.
- Edwards III, George, C., 1980. *Implementing Public Policy*. Washington D.C. : Congressional Quarterly Inc.
- Effendi, Onong. Uchjana. 1989. *Sistem Informasi Manajemen*. Bandung : Sinar Baru.
- Esmarah,. 1996. *Organisasi-Organisasi Modern..* Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Hoogerwerf, A., 1978. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mustopadidjaja, A.R., 2002. *Manajemen Proses Kebijakan Publik*, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara.
- Ndraha, Talidziduhu, 2001. *Ilmu Pemerintahan (Kybernology)*,

- Bandung; Pascasarjana Ilmu Pemerintahan IIP-Unpad.
- Nugroho D. Riant., 2003. *Kebijakan Publik, Formulasi-Implementasi dan Evaluasi*, Jakarta : PT Elex Media Komputindo.
- Ravianto, J. 1989. *Produktivitas dan Pengukuran*, Jakarta : Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktivitas.
- Riduwan. 2004. *Skala Pengukuran variabel-Variabel Penelitian*. Jakarta, Penerbit Alfabeta.
- Robbins, S.P., 1979. *Teori Organisasi, Struktur, Desain dan Aplikasi*, Alih bahasa Jusuf Udayana. Edisi III, Jakarta : Arcan.
- Smith, Kevin B. dan Christopher W. Larimer, 2009, *Public Policy Theory Primer*, Westview Press, United States of America.
- Stoner, James A. F., Freeman R. Edwar and Daniel R. Gilbert. 1996. *Manajemen. Jilid II. Edisi Bahasa Indonesia. Jakarta: PT. Prehallindo.*
- Supriatna, Tjahya, 1997, *Strategi Pembangunan Dan Kemiskinan*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Wahab, Solihin, Abdul, 2005, *Analisis Kebijakan; dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*”, Jakarta : Bumi Aksara.
- Westra, Pariata. 1985. *Manajemen Pembangunan Daerah*, Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Wibawa, Samudra, 1994. *Kebijakan Publik, Proses dan Analisis*, Jakarta : Intermedia.
- Wignyosoebroto, 1996. *Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta. : Gramedia.
- Makalah, Dokumen, Journal
- Dwiyanto, Agus, 1995. *Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik*, Makalah Seminar Kinerja Organisasi Pelayanan Publik, FISIPOL, Yogyakarta, UGM.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, Bandung, Citra Umbara, Bandung.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*, Bandung, Citra Umbara.

ISSN : 2443-1214

e-JKPP

Jurnal Kebijakan & Pelayanan Publik

Vol. 2 No. 1 Juli 2016

Diterbitkan Oleh :
Program Pascasarjana
Magister Ilmu Administrasi
Universitas Bandar Lampung

